



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Erna Djulawati
Lokasi : Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. SK.15/KPTS-IV/1999 Tanggal 18 Januari
1999
Luas : ± 184.206 Ha
Tanggal Penilaian : 24 September – 03 Oktober 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik”, sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (03 November 2017 s/d 02 November 2022).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok3
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 30 Oktober 2018

Bambang Gunardito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (SATU)
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT ERNA DJULIAWATI

- (1) Identitas LPPHPL
- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
 - b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
 - c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
 - d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
 - e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
 - f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
 - g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor/ Disupervisi /Ekologi)
Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor/Supervisor /MLK)
Ir. Bandang Adjiono (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiyati, S.Hut (Auditor Produksi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
 - h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifarahman
Didik Heru Untoro
Bambang Gunarjito
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin : PT ERNA DJULIAWATI
 - b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 15/Kpts-IV/1999
 - c. Luas dan Lokasi : 184.206 Ha,
Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
 - d. Alamat Kantor : Lyman Wing Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
Jl. Adi Sucipto Km-5, Pontianak, Kalimantan Barat
 - e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0561) 739777
 - f. Pengurus : Indradi Kusuma, S.H. (Komisaris Utama)
Leopard Lyman (Komisaris)
Ir. Iwan Djuanda (Direktur Utama)
Ir. Soeparto (Direktur)
Ir. Maman Surachman (Direktur)
David Lie (Direktur)
 - g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-006

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	20 September 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Erna Djuliawati dalam satu tahun terakhir.
	24 September 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi KALTENG dan BPHP Wilayah X di Palangkaraya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi KALTENG. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Erna Djuliawati dalam satu tahun terakhir.
	3 Oktober 2018, Kantor Kehutanan Provinsi KALTENG dan BPHP Wilayah X di Palangkaraya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi KALTENG. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	25 September 2018, Di Base Camp Bukit Beruang PT Erna Djuliawati	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-1 PHPL di PT Erna Djuliawati • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada Auditee oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan. <p>Penandatanganan Berita Acara</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 September s/d 1 Oktober 2018, di Base Camp Bukit Beruang PT Erna Djuliawati	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di base camp bukit Beruang PT Erna Djuliawati, areal produksi, lapangan dan masyarakat sekitar areal PT Erna Djuliawati.
Pertemuan Penutupan	1 Oktober 2018, Base Camp Bukit Beruang PT Erna Djuliawati	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian status temuan atau rekomendasi tahun sebelumnya (Re-Sertifikasi) • Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL • Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Oktober 2018, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Erna Djuliawati dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik". Dan nilai 95,45 %

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Kepastian kawasan areal kerja pemegang izin PT Erna Djuliawati, berdasarkan kelengkapan arsip dokumen legal perusahaan dan administrasi tata batas, tersedia lengkap SK IUPHHK-HT Nomor 15/Kpts-IV/1999, tanggal terbit penetapan 18 Januari 1999, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur luas 184.206 hektar, masa berlaku 35 tahun ditambah satu daur (35 tahun) sejak tanggal ditetapkan. Legalitas yang berubah satu tahun terakhir yaitu tentang perubahan susunan pengurus perusahaan sesuai Akta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nomor 71 tanggal 3 April 2017 oleh Notaris Rosita Rianauli Sianipar SH.MKn di Jakarta.. Pengarsipan dokumen administrasi tata batas di kantor lapangan Base Cam Bukit BeruangKM.97 lengkap sesuai tingkat realisasi yang sudah temu gelang dan telah mendapat SK Pengukuhan pada tahun 1993 dan tahun 2003. Status sangsi administratif penebangan diluar Blok RKT 2017sesuai BA WASDAL tanggal 30 Agustus 2017. Pada tanggal 30 Mei 2018 dinyatakan tidak dapat dikenakan Sanksi Administratif berdasarkan pasal 14 ayat (20) huruf e, Permenhut. P.39/Menhut-II/2008 mengingat penebangan didalam Blok RKT 2017.</p>
<p>Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)</p>	<p>Baik</p>	<p>Realisasi tata batas areal kerja PT Erna Djulawati sudah mencapai panjang 514.844 meter (seluruh trayek batas sudah mendapat SK pengukuhan). Realisasi tatau batas seluruhnya merupakan batas persekutuan dengan pemegang izin lainya dan hutan lindung pada poligon batas tepi luar dan batas persekutuan dengan andclave Pemukiman Garapan Masyarakat (PGM), hutan lindung bukit beruang poligon pada batas tepi dalam, legalitas dituangkan pada 81 set Berita Acara yang terlampir pada masing-masing Buku Laporan TBT.</p>
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Letak areal kerja PT Erna Djulawati pada umunya berbatasan dengan pemegang izin lainnya dan hutan lindung eksistensi areal kerja sudah mendapat persetujuan dari menteri kehutanan dan perkebunan tahun 1993, ditingkat tapak terbukti telah kordinasi dan bersinergi dengan UPT KPHP Unit Seruyan Hulu Unit XXI, BA tata batas dengan pemegang izin lainya yang bersekutu, namun adanya selisih pergeseran antar peta kerja dengan peta kawasan hutan dan perairan KHP Provinsi Kalteng. Nomor 529 tahun 2012, menjadi sumber konflik batas dengan areal kerja yang tetah ditata batas</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terlebih dahulu dilapangan dan telah mendapat SK Pengukuhan. Belum terdapat bukti rencana monitoring dan upaya penyelesaian yang terdokumentasi secara periodik.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Hasil penilaian sebelumnya verifier tidak dapat dilakukan penilaian, dalam satu tahun terakhir telah terbit persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI TPTJ sesuai Nomor SK.4000/MenLHK-PHPL/UPH/PHPL.1/6/2018 tanggal 21 Juni 2018 perubahan dokumen perencanaan berdasarkan perubahan susunan petak kerja didalam Blok RKUPHHK-HPHT TPTJ periode 2011-2020.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Didalam areal kerja PT Erna Djulawati sebagian sudah terdata pengguna kawasan diluar sektor kehutanan berupa Menara BTS tekonsel dan areal penggunaan industri RF dengan perijinan termasuk kedalam IMB sarpras pemegang izin sedangkan penggunaan kawasan hutan lainnya merupakan jenis bangunan sarana Pol Pos Tumbang Daraf dan Pos RPH perijinaannya belum dapat dipastikan termasuk IMB perusahaan atau izin tersendiri. GANIS-PHPL Binhut., Canhut., dan Kurpet. diketahui manager/direktur dapat melakukan kajian hasil pendataan jenis-jenis penggunaan kawasan sesuai beberapa pedoman regulasi yang isinya beririsan objek kemudian dikonsultasikan kepada instansi terkait yang berwenang untuk menetapkan status jenis kegiatan yang termasuk dalam kelompok pengguna kawasan diluar sektor kehutanan. Sedangkan upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin sudah dilakukan berupa tersedianya Tanaga Satpam, Pos Jaga dan pemasangan rambu larangan dan peringatan, kerjasama pengamanan bersama Polres dan Koramil.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya dituangkan pada naskah tertulis yang ditandatangani Direktur Utama pada tanggal 25 Juni 2012, dan merupakan satu kesatuan dalam SK persetujuan RKU Periode 2011-2020 dan revisinya pada tahun 2018, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal pada level pemegang izin PT Erna Djuliawati dan kepada masyarakat setempat sebanyak 14 Desa. Masing-masing kegiatan sosialisasi tercatat dalam dokumen Berita Acara Kegiatan serta kelengkapan bukti lainnya berupa materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi. Sedangkan secara informal naskah visi misi dituangkan melalui poster didalam dan diluar ruangan kantor dan ditempel pada papan informasi masing-masing Kantor Desa.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Visi misi PT Erna Djuliawati secara kongkrit dituangkan dalam 14 sasaran strategis RKU Periode 2011-2020. Berdasarkan penerbitan RKT tahun 2010 s.d. 2018 yang merupakan realisasi tahun ke 8 diketahui masih terdapat RKT carry over kegiatan penanaman dari tahun sebelumnya. Dalam menjaga mutu pelaksanaan sasaran strategis pemegang izin telah menyusun SOP terkait kegiatan produksi, ekologi, sosial.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1.	Baik	PT Erna Djuliawati sebagai pemegang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		izin IUPHHK-HT sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R) dan jumlahnya secara kumulatif sebanyak 47 orang sudah melebihi standar minimal yaitu (27/27=100%) orang yang kompeten teregister dan masih berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM khususnya tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANIS-PHPL) pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku sesuai kewajiban yaitu GANISPHPL Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R secara kumulatif jumlahnya telah melebihi 70% dari rencana sesuai kebutuhan minimal berdasarkan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Sedangkan pemenuhan kompetensi SDM tenaga teknis pendukung/Non GANIS-PHPL telah memadai sesuai kebutuhan internal perusahaan melalui kepesertaan training eksternal.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Erna Djuliawati dapat menunjukkan kelengkapan dokumen tenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan tenaga-kerjaan TKWNI, dalam hal kelengkapan dokumen Hubungan Industrial pemegang izin dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), P2K3, Klinik, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan	BAIK	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki strauktur organisasi pengesahan dengan pembubuhan tanda tangan Direktur Utama, model struktur organisasi pemegang izin sudah berkembang baik nomenklatur maupun unit kerja terintegrasi antara Base Camp dengan RO di Pontianak dan HO di Jakarta dalam hubungannya dengan tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL terdapat unit-unit kerja yang sangat memadai, setiap tingkatan jabatan dalam struktur organisasi telah dilengkapi Jobdescription. Khusus jobdescrcption bagian perencanaan dan produksi uraian jabatan telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan kehutanan tentang SI-PHPL dan tata kelola hutan secara self assessment.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Erna Djuliawati telah melengkapi perangkat keras pendukung sistem manajemen informasi yang tersebar mulai Blok kerja, TPK Hutan, TPK Antara, Kantor Base Camp, RO dan HO. Keberadaan perangkat lunak internal yang dimiliki perusahaan sudah sangat memadai dalam menjalankan SIM dalam kaitannya dengan keberadaan perangkat lunak dari KemenLHK terbukti telah mengimplementasikan SI-PUHH dan aplikasi terkait lainnya, E-Monev laporan konerja PHPL-HA sudah diimplementasikan didukung operator/tenaga pelaksana khusus yang ditugaskan berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Manager dan Direktur sudah berjalan lancar hingga optimalisasi penerapan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015. Perdirjen. PHPL Nomor : P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pedoman

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pelaksanaan Penyampaian Laporan Kinerja Pemegang (IUPHHK-HA) dan (IUPHHK-HTI) Secara Periodik sudah terlaksana.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Erna Djuliawati telah memilih dan menetapkan model pengawasan internal berbasis organisasi dilaksanakan oleh Tim SPI berdasarkan hasil pengawasan internal diketahui ruang lingkup pengawasan sudah efektif mencakup tahapan kegiatan PHPL sesuai implementasi standar PHPL dan VLK skema KemenLHK. dan terintegrasi dengan standar voluntary pengelolaan hutan lestari lainnya.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Hasil pengawasan oleh tim SPI tahun 2017 terdapat jenis-jenis temuan yang menjadi dasar tindakan perbaikan berbasis Monev. dituangkan dalam tabel disebut tabel rekomendasi. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev. dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruh rekomendasi. Pada dokumen monev. terdapat bukti rincian rencana perbaikan dan tindakan pencegahan terkait bidang perencanaan, binhut., produksi dan sosial.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT 2018 teridentifikasi mencakup (lahan perambahan dan lahan PGM, bantuan bibit tanaman berkayu, akses pemanfaatan HHBK (rotan, damar) dan lokasi areal tidak ditebang didalam Blok RKT. Hak-hak masyarakat setempat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan telah didahului penyampaian informasi awal melalui kegiatan sosialisasi dan telah mendapat persetujuan berupa Berita Acara Sosialisasi RKT tahun 2018 dengan warga Desa Tumbang Laku, Tumbang Darap dan Tumbang Kubang.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT Erna Djuliawati telah menata batas areal kerja temu gelang dilapangan, dalam proses tata batas areal kerjanya telah mendapat $(66/66=100\%)$ persetujuan para pihak yang menandatangani Berita Acara sebanyak 81 set yang termuat dalam 8 buku laporan tata batas.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR/CD PT Erna Djuliawati disebut PMDH tahun 2017 ditujukan kepada desa binaan di Tumbang Kubang dan Tumbang Laku dari sisi persetujuan proses pembuatan program PMDH telah mencapai persetujuan $(2/2=100\%)$ berupa Berita Acara berupa Berita Acara sosialisasi para pihak warga Desa Binaan dan dari sisi pelaksanaan atau realisasinya lima Program PMDH telah mencapai persetujuan $(5/5=100\%)$ baik item maupun biaya berupa Berita Acara serah terima dan kwitansi, hingga rata-rata persetujuan dalam proses penetapan program PMDH dan pelaksanaannya mencapai $(200/200=100\%)$.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Erna Djuliawati telah menetapkan lokasi-lokasi kawasan lindung yang tersebar pada seluruh areal kerja yang dalam proses penataan batasnya sesuai AMDAL dan RKUPHHK-HT Periode 2011-2020 telah mendapat persetujuan $(27/27=100\%)$ berupa SK Persetujuan dan Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung dari para pihak yang berasal dari persetujuan 2 instansi terkait dan warga masyarakat setempat sebanyak 25 Desa yang aktifitasnya berpeluang memanfaatkan lokasi kawasan lindung.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2011 s/d 2020 beserta peta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai surat Keputusan No. 169/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan surat Keputusan No. 4000/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Erna Duliawati telah melakukan penataan areal kerja RKT 2017 dan RKT 2018 dengan tingkat kesesuaiannya letak terhadap RKUPHHK sebesar 50,68 % dan kesesuaian luas sebesar 93%
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT Erna Djuliawati telah melakukan penandaan batas blok dan petak kerja di lapangan pada RKT 2017 dan RKT 2018, tanda batas di lapangan seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB 2010 dilengkapi peta pendukungnya dan ITSP selama 3 tahun terakhir (2016 s/d 2018) yang dilengkapi dengan peta pendukungnya yaitu peta pohon skala 1 :1.000
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki data pengukuran riap tegakan /PUP pada areal bekas blok tebangan dan PSP pada areal blok TPTI-I dan TPTJ dan telah melakukan analisis berupa riap diameter (cm/th) dan tinggi (m/th)
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Erna Djuliawati telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode penilaian dan menyampaikan laporan Ke Dinas terkait tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Erna Djuliawati telah membuat dan dapat menunjukkan ketersediaan SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur TPTJ yang lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku yaitu Permenhut P11/menhut-II/2009
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Erna Djuliawati telah mengimplementasikan seluruh SOP sistem silvikultur sesuai dengan tahapan sistem silvikultur TPTJ
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Erna Djuliawati mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan nilai ≥ 25 batang/Ha yaitu 67 batang/ha untuk RKT 2017 site A dan 53 btg/ha untuk RKT 2017 site B. Untuk Site A RKT 2018 sebanyak 65 btg/ha dan Site B sebanyak 39 btg/ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Erna Djuliawati mempunyai pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 dengan nilai anakan tiang berjumlah 165 batang /ha (LOA) dan 156 (Virgin Forest)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Erna Djuliawati telah membuat dan dapat menunjukkan SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Erna Djuliawati telah menerapkan penebangan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan SOP yang telah dibuat, dan mengacu kepada SOP RIL yang telah dibuat.
Verifier 2.4.3.	<i>Not</i>	Tingkat keterbukaan wilayah berdasarkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	<i>Applicable</i>	kajian FAO pada areal PT Erna Djuliawati sekitar 22,79%. Namun mengingat Sistem silvikultur TPTJ dengan teknik Silin, dimana pada jalur tanam selebar 3 m (15%) dijadikan jalur bersih, maka tidak memungkinkan keterbukaan wilayah di bawah 15 %, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor Eksploitasi kegiatan pemanenan kayu di areal PT Erna Djuliawati sebesar 0,87
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat dokumen RKT lebih dari 50% yang disusun berdasarkan RKU periode 2011-2020 dan telah disahkan secara <i>self approval</i>
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Erna Djuliawati telah membuat peta kerja RKT Tahun 2017 dan 2018 yang menggambarkan blok RKT dan kawasan lindung, namun sebagian Blok RKT tidak sesuai dengan peta RKUPHHK periode 2011-2020.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Erna Djuliawati telah mengimplementasikan peta kerja RKT 2017 dan 2018 berupa penandaan pada seluruh batas blok dan petak tebangan beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa sempadan sungai dan terlihat jelas di lapangan.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total, dan berkelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan yaitu sebesar 52,15 % (RKT 2017) dan 31,04% (RKT 2018) pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial perusahaan PT Erna Djuliawati cukup sehat dengan Likuiditas 274,11% , Solvabilitas 100%, Rentabilitas positif dengan opini terhadap laporan keuangan adalah Waja
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Erna Djuliawati pada tahun 2017 >80% yaitu sebesar 98,46 %
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Baik	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional perbedaan sebesar 20%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Erna Djuliawati telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan, namun masih terdapat yang kurang sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Berdasarkan laporan keuangan, realisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan secara keseluruhannya mencapai 96,95 % dari yang direncanakan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Sedang	PT Erna Djuliawati telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan yaitu 80 % (non TPTJ) dan 73,75% (TPTJ).
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Erna Djuliawati telah mengalokasikan dan menetapkan sebagian areal yang dikelolanya seluas 15.951 Ha dari luas areal kerjanya sebagai kawasan dilindungi sesuai dengan RKUPPHK-HA PT Erna Djuliawati Berbasis IHMB periode tahun 2011 – 2020 yang telah disahkan dan disetujui melalui Surat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Keputusan Menhut No. SK.169/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan SK Direktur yang terdiri atas Lereng > 40%, Buffer Zone Hutan Lindung, Kantong Satwa, Situs Budaya, Sempadan sungai, KPPN, Sempadan Mata air. Dan telah disesuaikan sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Erna Djuliawati periode 2011 – 2020 yang telah disahkan melalui KepMenLHK Nomor : SK.4000/MenLHK – PHPL/UHP/HPL1/2018, tanggal 21 Juni 2018, yaitu penambahan kawasan lindung sumber mata air HL Bukit Beruang seluas 175 Ha. Kondisi biofisik, baik fungsi, jenis dan tata letak kawasan lindung yang ada telah sesuai dengan dokumen perencanaan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Erna Djuliawati telah melakukan penataan kawasan lindung yang telah dialokasikan sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2018, realiasi penandaan batas kawasan lindung sepanjang 446,97 Km dari target tahun 2018 yaitu 474,81 Km atau 94,14 %.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil overlay Citra Landsat PT Erna Djuliawati, Citra Landsat 8 OLI Band 653 Landsat 7 ETM + Band 542 Path 120 Row 61 Liputan tgl 12 Juni 2016, 23 Mei 2016 dan 23 April 2016, kawasan lindung yang masih berhutan seluas 15.951 Ha, hasil verifikasi lapangan menunjukkan kondisi kawasan lindung dengan tutupan yang masih sangat baik.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	PT Erna Djuliawati telah melakukan upaya sosialisasi untuk mendapatkan pengakuan terhadap kawasan lindung, hal ini dituangkan dalam dokumen Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan, sasaran kegiatan ini adalah anak sekolah dan masyarakat, capaian pada tahun 2018 dari 14 desa binaan terealisasi sebanyak 15 Desa Binaan plus 1 Desa terdampak dan sebanyak 17 Sekolah SD dan SMP.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT Erna djuliawati telah melaksanakan pengelolaan kawasan ,lindung berdasarkan dokumen perencanaan, RKL/RPL dan peraturan yang berlaku, yang dituangkan dalam laporan Rencana Kerja Tahunan, Laporan RKL-RPL dan Laporan Implementasi, Identifikasi, Pengelolaan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Monitoring Areal HCVF IUPHHK PT Erna Djuliawati Pada Kawasan Lindung Konervasi dan Situs Budaya Tahun 2018
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki Prosedur terkait Perlindungan Hutan, prosedur mencakup jenis-jenis gangguan seperti gangguan hutan, penanggulangan kebakaran, perladangan, pemanfaatan HHBK, Perburuan, penebangan tanpa izin dan hama penyakit tanaman
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana Prasarana pengamanan hutan tersedia dengan baik dan sesuai ketentuan, namun untuk sarana perlindungan hutan bidang kebakaran yang tersedia sebanyak 41 Jenis atau 91,11 % dari seharusnya sebanyak 45 Jenis, sedangkan secara jumlah terpenuhi sebanyak 718 dari 1083 pcs atau 66,30 %, hal ini secara jumlah dan jenis belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PerMENLHK No. P. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Erna Djuliawati telah memiliki personil Satuan Pengamanan Hutan sebanyak 35 orang dengan kualifikasi personil telah sesuai ketentuan yakni telah mendapat pendidikan dan Latihan Satuan Pengamanan dari POLRI yang dibuktikan dengan Ijazah DIKLAT SATPAM, sedangkan personil Brigade Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebanyak 45 orang kualifikasi personil belum sesuai ketentuan, yaitu belum mendapat DIKLAT pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Instansi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT Erna Djuliawati telah melakukan upaya upaya perlindungan gangguan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan dan tindakan yang sesuai dengan kondisi gangguan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana dan Prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT Erna Djuliawati sesuai hasil verifikasi dokumen dan lapangan, menunjukkan keberadaan dan fungsinya bekerja dengan baik dan jenisnya telah sesuai dengan ketentuan (dokumen AMDAL dan Peraturan yang berlaku) dan peruntukannya
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah kualifikasi yang sesuai, yaitu tersedia sebanyak 14 GANIS PHPL-BINHUT, dari seharusnya 8 orang (PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015)
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan berupa Rencana Kelola Lingkungan AMDAL tahun 1997 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA 2018, yang dalam pelaksanaannya diturunkan dan prosedur kerja. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan dan peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam laporan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan dilaporkan setiap semester kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Dinas lingkungan Hidup Prov. Kalteng dan Dinas Lingkungan Hidup Kab Seruyan, serta KLHK.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan AMDAL tahun 1997 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA 2018, yang dalam pelaksanaannya diturunkan dan prosedur kerja. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan dan peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam laporan pelaksanaan Pemantauan Lingkungan dan dilaporkan setiap

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		semester kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Dinas lingkungan Hidup Prov. Kalteng dan Dinas Lingkungan Hidup Kab Seruyan, serta KLHK
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Dalam Operasional kehutanan PT Erna Djuliawati terdapat indikasi dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun besarnya masih sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku, hal ini dikarenakan PT Erna Djuliawati melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai dokumen RKL-RPL, RKUPHHK-HA dan Ketentuan/peraturan yang berlaku.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan telah sesuai dengan peraturan terbaru tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi yaitu PerMenLHK no P. 92 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi peraturan yang berlaku.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Erna Djuliawati telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang berdasarkan ketentuan /peraturan yang berlaku dan mencakup seluruh kelompok jenis flora dan fauna.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki prosedur pengelolaan flora, Prosedur mencakup species dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang ada di areal kerja
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan belum mencakup seluruh jenis hasil identifikasi, sedangkan tahapan pengelolaan baru kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pemantauan, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan
Verifier 3.5.3. Kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin akibat dari kegiatan operasional kehutanan sendiri, gangguan perambahan lahan, penebangan tanpa izin dan perburuan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki prosedur pengelolaan fauna, Prosedur mencakup species dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang ada di areal kerja
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan belum mencakup seluruh jenis hasil identifikasi,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengelolaan secara menyeluruh diprioritaskan pada spesies kunci antara lain orang utan, sedangkan tahapan pengelolaan baru kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pemantauan, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan</p>
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Masih terdapat potensi gangguan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin akibat dari kegiatan operasional kehutanan sendiri, gangguan perambahan lahan, penebangan tanpa izin dan perburuan.</p>
<p>4. Sosial</p>		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>	Baik	<p>PT Erna Djuliawati memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, yang tertuang pada dokumen studi HCVF, Dokumen Rencana Sepuluh Tahunan, dokumen pencatatan HHBK. Pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH yang teridentifikasi pada dokumen tersebut adalah Pemukiman dan Garapan Masyarakat (PGM), perladangan masyarakat, Kawasan Situs budaya dan Hutan Adat, pemanfaatan HHBK</p>
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Baik	<p>Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & konflik batas kawasan berupa SOP yang telah di revisi seperti SOP Pembuatan Tata Batas Pemukiman dan Garapan Masyarakat PT Erna Djuliawati BCBB (Revisi II, September 2013), Nomor EDL/SOP/4.1, SOP Penanganan Konflik PT Erna Djuliawati BCBB (Revisi V, 2017), Nomor EDL/SOP/4. Mekanisme tersebut telah diimplementasikan dan disepakati</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	para pihak. PT Erna Djuliawati memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berbentuk standar operating procedure (SOP). Terdapat duapuluh satu SOP terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yaitu terkait hak pemanfaatan lahan, hak pemanfaatan HHBK, hak mendapatkan informasi terkait operasional PT. Erna Djuliawati. Mekanisme berupa SOP tersebut lengkap, legal dan jelas
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki bukti- bukti tentang luas dan batas kawasan dengan batas kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas Pemukiman dan Garapan Masyarakat, dan Batas Konsesi yang telah temu gelang
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	Terdapat persetujuan para pihak terhadap luas dan batas PT. Erna Djuliawati berupa Batas Konsesi yang telah temu gelang dan adanya SK Pengukuhan, adanya Batas dan SK Pengukuhan Batas Pemukiman dan Garapan Masyarakat, Adanya Batas partisipatif PGM yang disetujui masyarakat. Masih ada konflik berupa perladangan berpindah/rotasi, akan tetapi dapat dikelola dengan baik. Kecenderungan perladangan berpindah cenderung menurun dan PT. Erna Djuliawati melakukan upaya sosialisasi terkait pelestarian hutan dan pola-pola pertanian menetap, untuk menekan pola perladangan berpindah.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan, berupa dokumen kebijakan umum (Landasan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), Dokumen rencana sepuluh tahunan (RKUPHHK-HA), Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK tahun 2017 dan 2018), serta dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal dalam bentuk SOP. Mekanisme dalam bentuk SOP tersebut telah mengkonodir pelaksanaan kewajiban sosial terhadap masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Erna Djuliawati memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Seluruh desa-desa telah tercakup dalam kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Tingkat partisipasi dalam kegiatan sosialisasi masih kurang. Materi sosialisasi secara substantif belum menyeluruh
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT. Erna Djuliawati telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada seluruh desa-desa binaan yang berjumlah 15 Desa. Realisasi kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial telah mencapai lebih dari 100 % dari rencana. Bukti-bukti realisasi tersedia lengkap dan diakui oleh desa-desa terkait.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Terdapat laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Erna Djuliawati terhadap masyarakat secara lengkap terdiri atas dokumen Identifikasi, Laporan pelaksanaan, Laporan Monitoring, dan dokumen penilaian.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. Erna Djuliawati. Data tersebut berupa data karyawan lokal, data inventarisasi HHBK, data masyarakat yang berladang, serta data monografi desa-desa binaan yang berjumlah 15 Desa.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen Standar Operating Procedure. Terdapat enam belas SOP terkait

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT. Erna Djuliawati memiliki dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas berupa dokumen kebijakan umum, dokumen rencana sepuluh tahunan, dokumen rencana tahunan, dokumen rencana operasional, dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT. Erna Djuliawati, berupa peran serta sebagai pekerja lokal, peningkatan aktivitas ekonomi berupa pembelanjaan lokal, dan implementasi program kelola sosial bidang ekonomi. Total Implementasi mencapai 45,8 % atau kurang dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT. Erna Djuliawati memiliki dokumen/laporan lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak. Dokumen-dokumen tersebut terdokumentasi dengan baik
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT. Erna Djuliawati memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP. SOP yang ada lengkap dan jelas dan bersifat implementatif, sehingga dapat mengakomodir penanganan konflik yang ada terkait operasional perusahaan hutan. Selain itu SOP telah mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan potensi konflik di PT. Erna Djuliawati berupa perladangan masyarakat, dan hak-hak masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan hutan. Terdapat pemetaan konflik yang sudah sesuai dengan Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik. Dokumen pemetaan Konflik sudah disampaikan kepada Instansi terkait.
Verifier 4.4.3	Baik	PT. Erna Djuliawati memiliki organisasi,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak		sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Organisasi telah mendapat persetujuan dari perwakilan masyarakat, sumberdaya manusia memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup, serta dana tersedia cukup untuk mengelola konflik dengan terselesaikannya konflik yang ada yang membutuhkan pendanaan sebagai kompensasi.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Terdapat dokumen penanganan konflik yang terjadi pada periode tahun 2017 dan 2018 hingga Agustus. Dokumen lengkap, jelas dan terdokumentasi dengan baik.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan Industrial pada PT. Erna Djuliawati didasarkan pada dokumen Perjanjian kerja Bersama yang sah dan masih berlaku. Seluruh hubungan industrial yang tertera pada dokumen PKB telah direalisasikan pada seluruh karyawan/pekerja.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT. Erna Djuliawati memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana pelatihan/training eksternal dan training internal. Pada tahun 2017 Seluruh rencana pengembangan kompetensi tersebut telah direalisasikan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan petunjuk teknis penilaian pekerja (24.11/D2/Sos/II/III) Form General Affair, Penilaian. Butir-butir dalam dokumen tersebut telah diimplementasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah dan masih berlaku. Seluruh butir-butir pada dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Erna Djuliawati berdasarkan Peta Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, areal PT Erna Djuliawati termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 179.177 Ha, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 5.029 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal PT Erna Djuliawati terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat menara komunikasi yang berfungsi juga sebagai sarana pendukung komunikasi dan pendukung jaringan untuk pengoperasian SIPUHH.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i>	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 s.d 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 169/VI-BUHA/2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		2011 – 2020 atas nama PT Erna Djuliawati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Desember 2011. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Erna Djuliawati Skala 1 : 100.000 PT Erna Djuliawati juga telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 s.d 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4000/MenLHK-PHPL/UHP/HPL1/6/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 – 2020 atas nama PT Erna Djuliawati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Juni 2018. Dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Erna Djuliawati Skala 1 : 100.000. PT Erna Djuliawati telah membuat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang telah disahkan oleh secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Erna Djuliawati melalui Keputusan Direktur Utama
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun 2018 telah disahkan oleh Direktur Utama PT Erna Djuliawati secara <i>self approval</i> dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun 2018.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah mempunyai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 - 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK. 169/VI-BUHA/2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 – 2020 atas nama PT Erna Djuliawati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Desember 2011. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Erna Djuliawati Skala 1 : 100.000. PT Erna Djuliawati juga telah mempunyai Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 s.d 2020 PT Erna Djuliawati yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4000/MenLHK-PHPL/UHP/HPL1/6/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 – 2020 atas nama PT Erna Djuliawati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Juni 2018. Dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Erna Djuliawati Skala 1 : 100.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Erna Djuliana tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Erna Djuliawati dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan Km 96 diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,10%. Sedangkan uji petik fisik kayu di TPK Antara/Logpond Kelakik diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2,21%, seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Erna Djuliawati telah mengangkut kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Kelakik dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB di TPK Hutan diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB TPK Hutan pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2017 dan Tahun 2018 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor pohon hasil cruising, nomor kode scaler dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode September 2017 – Agustus 2018, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Erna Djuliawati tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau, seluruh kayu yang dihasilkan dikirim ke industri ply mill yang merupakan satu entitas bisnis yang berada di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Erna Djuliawati tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dan dokumen angkutan SKSHK
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen AMDAL terdiri dari, Laporan Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Kepala Kepala Komisi Pusat AMDAL DEPHUT berdasarkan Keputusan Komisi AMDAL DEPHUT No. 59/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 03 April 1997. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari ANDAL yang telah disetujui Kepala Komisi Pusat AMDAL DEPHUT berdasarkan Keputusan Komisi AMDAL DEPHUT No. 59/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 03 April 1997. Dokumen RKL RPL mengacu kepada dokumen ANDAL yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial ekonomi budaya.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.03/DISNAKERTRANS/II/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) untuk seluruh karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Erna Djuliawati telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam PUK KAHUT Indonesia K.SPSI PT Erna Djuliawati Logging Unit II.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan dan telah mendapat Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan Nomor: 560/1322/DISNAKERTRANSPAR/XI/2016 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Erna Djuliawati Logging

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Unit II Base Camp Bukit Beruang dengan Serikat Pekerja Kahut Indonesia (PUK SPSI KAHUT Indonesia K-SPSI), ditetapkan Kualanya Pembuang tanggal 17 Nopember 2016. Ditandatanganinya oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan, Drs. Megantoro. Perjanjian Kerja Bersama berlaku sejak tanggal 18 Nopember 2016 – 17 Nopember 2018.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Erna Djulawati tidak terdapat karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Erna Djulawati sampai dengan Bulan Agustus 2018 untuk lokasi camp memiliki jumlah karyawan sebanyak 947 orang terdiri dari tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak waktu tertentu, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja harian. Sedangkan jumlah karyawan yang bekerja di kantor Regional Pontianak sebanyak 6 orang dan di Kantor Pusat Jakarta sebanyak 4 orang seluruhnya berstatus pegawai tetap.